

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudhy A, 2008, *Hukum Kepailitan Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Nurdin, Andriani, 2004, "Masalah Seputar Actio Pauliana", Dalam: Emmy Yuhassarie (ed.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, Ny dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta.

_____, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, R, 1977, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Bandung.

_____, 1992, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesembilan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, PT. Intermasa, Jakarta.

Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Tata Wijayanta, 2016, *Undang-undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

A. Artikel Jurnal:

Anisah, Siti, "Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana", *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, April 2016, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 205-221.

Dewi, Ni P. A A dan A.A Ngr. Yusadarmani, "Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan", *Kertha Semaya*,

Vol. 1, No. 5, Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, hlm. 1-5.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 216-226.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 - 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* 1847 - 23)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 142)

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

D. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pdt.sus%2Factio+pauliana>, diakses 20 September 2018